

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Ngadisah (2003), “Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua”, bahwa perang antar suku pada masyarakat Mimika merupakan faktor bawaan yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi perang suku adalah salah satu indikator penting mengenai hal ini. Tradisi suku-suku yang ada disekitar Mimika masih dipegang teguh untuk memelihara eksistensi sekaligus upaya untuk menjadi suku yang dominan di antara suku-suku lain. Kolektivitas di dalam suku dijaga ketat dengan tradisi, sehingga kesadaran kolektif tetap tertanam. Sepanjang tidak ada musuh bersama di antara mereka, maka persaingan antar suku kembali menguat (Ngadisah, 2003 : 246).

Sejarah suku Amungme pada abad yang lalu juga diwarnai dengan serangkaian peperangan besar maupun kecil. Perang kecil hanya melibatkan anggota klen, sedangkan perang besar melibatkan seluruh penduduk pada beberapa lembah. Sebagai rumpun suku yang berdiam di dataran tinggi, orang Amungme dan suku-suku yang bertetangga dengannya mempunyai tradisi perang. Perang bagi suku-suku bangsa yang berdiam di pegunungan mempunyai makna yang sangat dalam dan merupakan bagian dari sistem sosial. Peperangan mempunyai dasar-dasar dan fungsi yang lebih dalam. Dalam kehidupan masyarakat Dani, berperang telah berakar dalam sistem religinya dan merupakan kegiatan yang suci yang diwajibkan oleh nenek moyang mereka. Memang rupanya perang merupakan intisari dan

romantika kehidupan masyarakat orang Dani (Koentjaraningrat, 1992 : 287 dalam Ngadisah, 2003 : 46).

Penyebab utama peperangan adalah balas dendam atas pembunuhan yang lampau, ejekan, tuduhan praktek ilmu sihir, babi yang menerobos kebun, dan wanita yang diculik. Sangat jarang terjadi peperangan di dataran tinggi Papua yang dikerahkan dengan tujuan menguasai lebih banyak tanah, kecuali kadang-kadang saja terjadi dan pada beberapa daerah dengan tekanan populasi tinggi yang berarti memerlukan tanah perkebunan yang lebih luas. Atau jika terjadi perselisihan atas suatu wilayah dengan sumber makanan yang berharga, seperti tanaman pandan hutan (Muller, 2009 : 153). Peperangan mendarah-daging bagi warga Papua pegunungan dan tetap demikian adanya, paling tidak sebagai bagian, sampai saat ini. bagi pemuda dan lelaki usia pertengahan dimanapun, peperangan adalah hal utama. Mereka harus siaga setiap saat untuk mengambil busur dan panah mereka untuk menangkis kelompok penyerang. Peperangan adalah bagian kehidupan sehari-hari. Pertempuran adalah bagian integral dari masyarakat dataran tinggi, secara erat terikat pada kepemimpinan, kekuasaan, wibawa, dan agama; terjadi hampir dimana-pun juga dan dalam berbagai tingkatan yang lebih rendah ekonomi dan inisiasinya (Muller, 2009 : 154-155).

Dalam penelitian Kossay (2011), konflik yang bersumber dari motif sosial budaya kadang terjadi dari perbedaan pandangan terhadap isu-isu sensitif, Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) merupakan akibat dari kegagalan pembangunan dalam bidang pemberdayaan masyarakat adat, pendidikan dan kesehatan.

Konflik karena perbedaan SARA sangat berpotensi kuat. Masyarakat Papua yang hetero-gen terdiri dari 250 an suku, bahasa dan adat istiadatnya berpotensi besar menyulut sebuah konflik. Peristiwa perang suku di Timika yang terus menerus bergolak salami ini, dan peristiwa penyerangan kampung Yoka Sentani Jayapura oleh sekelompok masyarakat

Pegunungan Tengah 10 November 2010 lalu merupakan contoh konkrit bahwa masalah SARA di Papua sangat rawan timbulnya konflik. Perbedaan pandangan antara sesama orang Papua sendiri, yaitu Papua gunung dan pantai maupun Papua Utara dan Selatan masih diwarnai dalam pergulatan kepentingan politik lokal, sehingga semangat primordialisme kesukuan semakin kuat dalam kehidupan ber-masyarakat.

Semangat primordialisme berdasarkan SARA sebagaimana tersebut di atas, dapat mendo-rong timbulnya rasa kekecewaan kelompok suku lain yang tidak terakomodasi atau merasa dikorbankan oleh kebijakan pimpinan daerah berdasarkan semangat primordialisme tersebut. Kelompok yang dikecewakan tadi semakin lama akan dapat mempengaruhi masyarakat luas dengan isu-isu sensitif untuk menciptakan konflik baru, bahkan mendiskreditkan wibawa pemer-intah. Itulah sebuah fakta yang terjadi selama ini di Papua (Kossay, 2011 : 118-119).

Di dalam penelitian Jurnal program studi damai dan resolusi konflik Hidayat, dkk, (2017) “Analisis Kebijakan Penanganan Konflik Etnis di Kota Sorong Papua Barat” Bahwasanya latar belakang konflik etnis di antara masyarakat asli Papua dan pendatang disebabkan oleh beberapa faktor yang disusun berdasarkan banyaknya intensitas yang terjadi. Faktor *pertama*, ketertiban masyarakat seperti terjadinya pemalakan, perkelahian, hingga pembunuhan. Hubungan masyara-kat yang memiliki persamaan entitas, faktor *kedua*, sosial budaya. Hubungan erat yang mengikat setiap individu ke dalam suatu kelompok menjadikan sebuah permasalahan individu menjadi permasalahan bersama. Akhirnya yang terjadi konflik akan mengalami eskalasi sehubungan dengan bertambahnya aktor konflik yang terlibat. Pengaruh budaya kolektivisme masih mengakar dalam setiap individu yang ada di Kota Sorong. Faktor *ketiga*, ekonomi. Penguasaan sektor informal pada sumber-sumber ekonomi lebih didominasi oleh masyarakat pendatang dibandingkan masyarakat asli Papua sehingga secara tidak langsung timbul kecemburuan sosial di dalam interaksi antara kedua kelompok

masyarakat tersebut. Faktor *keempat*, politik. Aktor politik terjadi ketika suatu kelompok berusaha memperjuangkan kepentingan politiknya namun akhirnya terbentur dengan kelompok lain karena memiliki kepentingan yang sama. Faktor *kelima*, ideologi. Faktor ideologi muncul ketika beberapa oknum dalam masyarakat lokal merasa tidak diakomodir oleh pemerintah. Selain itu terbatasnya pengakuan terhadap identitas asli orang Papua ditambah lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat lokal kebanyakan yang tidak lebih baik dari masyarakat pendatang membuat hal-hal tersebut sebagai pendorong terciptanya paham separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hidayat, dkk, 2017).

Dalam penelitian Habib (2009), “Konflik Antaretnik di Pedesaan Pasang Surut Hubungan Cina-Jawa”, bahwa perubahan konstruksi sosial dan posisi sosial tersebut sebenarnya juga men-cerminkan pola interaksi antara etnik Jawa dengan etnik Cina. Perilaku terpola dalam interaksi antaretnik berbeda dengan pola berperilaku yang ditetapkan secara legal, sehingga dinamika pola interaksi berubah dari pola penguasaan, kerjasama, persaingan, pertikaian. Penguasaan berciri dominasi etnik Cina terhadap etnik Jawa, kerjasama bercirikan bertindak bersama dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Persaingan berciri perebutan sumber daya pokok masyarakat perta-nian, yaitu tanah. Pertikaian berciri terabaikannya ketentuan-ketentuan hukum yang oleh sebagian pihak dipandang tidak aspiratif (Habib, 2009 : 152).

Di dalam jurnal Rosyid (2012) bahwa tahun demi tahun tak menggembirakan soal kerukunan antarumat manusia, baik intern maupun antarumat beragama dan antaretnis. Sebagian kelompok pemahamannya sempit tentang makna perbedaan. Faktor kemiskinan, pengangguran, pendidikan, infrastruktur yang lemah atau masalah lingkungan mendukung terjadinya konflik (Rosyid, 2012).

Dalam jurnal Ardiansyah (2010), “Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali : Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik”, bahwa faktor penyebab konflik etnis Samawa dengan etnis Bali ditinjau dari aspek sosial politik disebabkan karena munculnya kecemburuan sosial di kalangan warga etnis Samawa, di mana etnis Bali banyak yang berprestasi dan berhasil mendapat akses dari pemerintah pusat dalam menduduki jabatan-jabatan penting di birokrasi (pemerintahan/swasta/BUMN); sebagai anggota muspida, ketua pengadilan negeri, kepala Kejaksaan negeri, danres, kepala PLN, kepala Telkom, kepala bank, kepala agraria, dan kepala asuransi, pejabat swasta, BUMN, dan lain-lain staf di bawahnya. Upaya resolusi konflik etnis Samawa dengan etnis Bali pasca konflik dilakukan melalui rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai tokoh etnis yang ada di Kabupaten Sumbawa, meningkatkan komunikasi budaya antar kedua etnis, mewaspadaikan berbagai bentuk isu dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab, agar tetap menjaga rasa aman, dan kembali menjalin hubungan yang harmonis, saling pengertian dan toleransi (Ardiansyah, 2010).

Dalam penelitian Kum (2012), “Konflik Etnik Telaah Kritis dan Konstruktif Atas Konflik Etnis di Tanah Papua”, bahwa setiap konflik yang terjadi di Kabupaten Mimika, tidak hanya satu permasalahan saja tetapi bermacam-macam permasalahan, baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal. Di dalamnya adalah konflik masalah tanah, pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemekaran daerah, otonomi khusus, minuman keras (miras), dulang tradisional (dulang emas), kesejahteraan, jabatan/posisi, kecemburuan sosial, harta kawin yang tidak dilunaskan, bantuan dana Freeport dan lain-lain. Proses atau akibat terjadinya konflik antar etnis di Kabupaten Mimika. Dapat menyimpulkan bahwa: *pertama*, rasa ingin memiliki karena mau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya; *kedua*, merasa bahwa dirinya memiliki hak yang sama sehingga harus mempertahankan apa yang dianggap menjadi haknya; dan *ketiga*, perbedaan persepsi atau pemahaman tentang sesuatu; *keempat*, minimnya sumber

daya manusia (SDM) dan rendahnya tingkat kesadaran individu maupun kelompok (Kum, 2012 : 94-95).

Dalam penelitian Bebari (2008) “Mengungkap Tabir Perang Suku di Timika Papua” bahwa di Kabupaten Mimika dan Papua sangat rentan terhadap konflik akibatnya antar lain adalah : *pertama*, Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas; *kedua*, Kekurangan dukungan infrastruktur, energi dan telekomunikasi; *ketiga*, Lemahnya dukungan kelembagaan (sistem organisasi dan manajemen) dan kepemimpinan (*leadership*) yang memadai; *keempat*, Penerapan sistem sentralisasi dan pendekatan pembangunan *top down* telah menciptakan ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah yang berakibat melemahnya partisipasi aktif masyarakat terhadap proses pembangunan; *kelima*, Hak-hak masyarakat tidak terlindungi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga Sumber Daya Alam milik rakyat hanya dikelola oleh sekelompok orang yang tidak memberi dukungan kepada rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya; dan *keenam*, Tidak ada pemberdayaan terhadap kepemimpinan organisasi kemasyarakatan, sehingga hak-hak dasar masyarakat tertindas (Bebari, 2008).

Dalam jurnal Ahmadin (2017) “Konflik Sosial Antar Desa dalam Perspektif Sejarah di Bima”, bahwa penyebab terjadinya konflik sosial, di antaranya adalah: *pertama*, watak keras masyarakat desa, kebiasaan dalam aktifitas keharian atau dalam waktu tertentu secara konsisten, akan membentuk karakter sesuai kebiasaan tersebut di lengkapi pula oleh kondisi alam dalam waktu yang bersamaan. *Kedua*, kinerja struktur pemerintah setempat, minimnya komunikasi emosional antara pemerintah desa setempat, terutama tidak adanya langkah-langkah antisipasif terhadap kemungkinan pecahnya perang. *Ketiga*, lambannya tindakan pihak keamanan, dengan terus berlarutnya konflik yang begitu lama, menonjolkan pula minimnya kinerja pihak keamanan yang lebih dominan pihak kepolisian. Namun, faktor-faktor penyebab

konflik sosial tidak pernah bersifat sederhana dan tunggal, melainkan bersifat kompleks dan berkait secara rumit (Ahmadin, 2017).

Dalam penelitian Amirrachman, dkk (2007), berkaitan dengan konflik sosial di Ambon, salah satu faktornya adalah masyarakat yang lama tertekan secara serius oleh perubahan sosial yang berlangsung cepat sejak abad sebelumnya, sepenuhnya kehilangan pegangan dalam suasana krisis yang menjadi-jadi semenjak awal 1998. Tak mampu mencapai kesepakatan bersama berkaitan dengan nilai-nilai yang memelihara stabilitas, mereka kemudian terperosok ke dalam perilaku kekerasan. Analisis lain menyebutkan bahwa konflik komunal yang tiba-tiba pada saat menjelang pemilu di daerah yang sebelumnya tidak pernah mengalami hal serupa, menimbulkan kecurigaan bahwa kekerasan yang ditimbulkan sebagai sesuatu yang direkayasa oleh elit (Amirrachman, dkk, 2007 : 121).

Berkaitan dengan konflik Maluku terjadi karena, pengaruh-pengaruh eksternal antara lain karena kepentingan ideologi, kepentingan politik, kepentingan ekonomi, maupun psikologi keagamaan atau keimanan dan lain-lain, secara perlahan-lahan telah berpengaruh bagi penguatan perasaan primordialisme berdasarkan ikatan SARA dan memperlemah bridging social capital yang puncaknya pada konflik Maluku sebagai suatu peristiwa yang kelam dalam sejarah peradaban umat manusia teristimewa dalam kehidupan anak negeri Maluku (Waileruny, 2010 : 246).

Soni, dkk, (2017) mengatakan “Konflik pada Masyarakat Pantai Utara Jawa Barat (Studi Kasus di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu” bahwa konflik dipicu karena adanya provokator. Konflik yang terjadi di masyarakat umum sebagian besar disebabkan karena adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh para pelaku konflik. Selain itu, konflik juga disebabkan karena adanya persaingan dalam perebutan kekuasaan. Dalam hal perebutan kekuasaan terkait dengan pilkades. Sedangkan dalam konflik masyarakat nelayan, konflik juga disebabkan karena adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh para

pelaku konflik. Selain itu, konflik pada masyarakat nelayan juga disebabkan karena adanya persaingan sumber daya ekonomi (Soni, dkk, 2017).

Sebenarnya penelitian tentang perang antar suku ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Ngadisah, dengan topik dan lokasi yang berbeda, penelitian terdahulu menekankan tentang pembangunan dalam konteks pembangunan fisik proyek pertambangan Freeport. Dan juga Kum, melakukan penelitian tentang perang antar suku dengan lebih menekankan pada tuntutan tanah. Kemudian penelitian-penelitian terdahulu lainnya menekankan tentang kepentingan politik, ekonomi, kekuasaan, sosial-budaya, ideologi. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut bahwa masyarakat merasakan ketidakadilan, diskriminasi, ketidakpuasan, kecemburuan sosial dan balas dendam. Perbedaan dalam penelitian ini merupakan fokus penelitian yang lebih menekankan pada makna perang suku. Barang kali obyektivitas lokasi dan sasaran berbeda, berlainan daerah dalam kultur dan kondisi sosial yang lain, tentu ada persamaan dan perbedaannya.

B. Kajian Konsep

1. Sejarah Konflik Abdul Rahman Ibnu Khaldun (1332-1406)

Konflik menurut Khaldun bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah dari yang lain, tetapi konflik muncul dan berkembang dari interaksi antar individu dan antar kelompok dan suku-suku dalam berbagai aktivitas sosial, politik dan ekonomi. Menurutnya terdapat tiga perspektif konflik berkaitan langsung dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik pada waktu itu. *Pertama*, perspektif psikologis yang merupakan dasar sentimen dan ide yang membangun hubungan sosial di antara berbagai kelompok manusia (keluarga, suku dan lainnya). *Kedua*, fenomena politik yang berhubungan dengan perjuangan memperebutkan kekuasaan dan kedaulatan yang melahirkan imperium, dinasti dan negara. *Ketiga*, fenomena ekonomi yang

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi baik ditingkat individu, keluarga, masyarakat maupun negara.

2. Sejarah Konflik Karl Marx (1818-1883)

Pada zaman yang modern ini, di mana orang dengan berbagai aktivitas dan kepentingan datang siliberganti, terkadang dapat membuat individu atau kelompok mengalami disjungsi atau persinggungan dengan individu atau kelompok yang lainnya sehingga dapat mengakibatkan konflik. Konflik adalah sesuatu hal yang bersifat alami dan tak terelakkan. Konflik yang berke-panjangan terkadang dapat memperburuk tatanan social masyarakat. Namun, konflik pun juga dapat berperan positif dalam memperkuat persatuan suatu kelompok. Tanpa konflik suatu hu-bungan tidak akan hidup. Sedangkan ketiadaan konflik dapat menandakan terjadinya penekanan masalah yang pada suatu saat bisa menimbulkan suatu ledakan yang benar-benar besar (*latent conflict*). Untuk itu dibutuhkan suatu teori yang dapat menyelesaikan ataupun meminimalisir terjadinya konflik dalam kehidupan bermasyarakat.

Perspektif konflik dapat dilacak melalui pemikiran tokoh-tokoh klasik seperti Karl Marx (1818-1883), Emile Durkheim (1879-1912), Marx Weber (1864-1920), dan George Simmel (1858-1918). Keempat pemikir ini memberi kontribusi sangat besar terhadap perkembangan analisis konflik kontemporer. Di samping itu, Ibnu Khaldun pun sesungguhnya memberikan berkontribusi besar terhadap teori konflik. Teori konflik Khaldun bahkan merupakan satu analisis komprehensif mengenai horisonal dan vertikal konflik. Proposisi ini dipaparkan dalam rangka untuk memahami dinamika yang terjadi di dalam masyarakat (Perwita, dkk. 2015 : 54).

3. Sejarah Konflik George Simmel (1858-1918)

Menurut Simmel, konflik tidak akan pernah lenyap dari panggung kehidupan masyarakat, kecuali lenyap bersamaan dengan lenyapnya masyarakat. Simmel memandang konflik sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat. Struktur sosial dilihatnya sebagai gejala yang mencakup berbagai proses asosiatif dan disasosiatif yang tidak mungkin dipisah-pisahkan, namun dapat dibedakan dalam analisa. Konflik dapat menjadi penyebab serta pengubah kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok. Dalam kenyataannya, faktor-faktor disasosiatif seperti kebencian, kecemburuan dan lain sebagainya, memang merupakan penyebab terjadinya konflik. Dengan demikian, konflik ada untuk mengatasi berbagai dualisme yang berbeda, walaupun dengan cara meniadakan salah satu pihak yang bersaing.

Gejala tersebut tidak semata-mata berarti sama dengan pedoman *sivis pacem para bellum* (kalau menghendaki kedamaian, bersiaplah untuk perang). Konflik berfungsi mengatasi ketegangan antara hal-hal yang bertentangan dan mencapai kedamaian. Lebih lanjut Simmel mengatakan, apabila seseorang menjadi lawan rekannya, maka hal itu tidak harus merupakan faktor sosial yang negatif murni, walaupun mungkin kadang akibatnya tidak menyenangkan bagi pihak lain. Kadang-kadang manusia memang harus berinteraksi dengan orang-orang lain yang mempunyai sikap-sikap yang kurang menyenangkan. Oposisi tidak hanya merupakan sarana untuk mempertahankan hubungan, akan tetapi juga merupakan salah satu fungsi konkret hubungan tersebut.

Menurut Simmel, antagonisme merupakan unsur dalam kerjasama. Apabila antagonisme tidak menghasilkan kerja sama, maka secara sosiologis antagonisme merupakan suatu unsur yang tidak pernah ada dalam kerja sama. Jika antagonisme yang tidak bersifat

positif ini tidak berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan konflik, yang juga disebut dengan fungsi latent dari antagonisme. Konflik yang terjadi sebenarnya berlangsung dengan harapan bahwa antagonisme akan berhenti apabila mencapai titik tertentu, karena kesadaran bahwa hal itu tidak ada manfaatnya. Dalam konflik kepentingan, Simmel menyatakan bahwa ada kemungkinan konflik hanya menyangkut unsur-unsur tertentu diluar masalah-masalah pribadi. Kadang kala konflik itu menyangkut para pihak dalam aspek subyektifnya tanpa menyinggung kepentingan obyektif yang sama. Pemisahan antara kepentingan obyektif dengan persoalan pribadi, akan dapat menyebabkan tiadanya antipati pribadi.

4. Sejarah Konflik Max Weber (1864-1920)

Weber meyakini bahwa konflik terjadi dengan cara yang jauh lebih dari sekedar kondisi-kondisi material. Weber mengakui bahwa konflik dalam memperebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial. Tetapi jangan dilupakan bahwa banyak tipe-tipe konflik lain yang juga terjadi. Di antara berbagai tipe konflik tersebut, Weber menekankan yang sangat penting.

Pertama, yaitu bahwa konflik dalam arena politik sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Baginya kehidupan sosial dalam kadar tertentu merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagai individu dan kelompok tertentu yang lain dan dia tidak menganggap pertentangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sebaliknya Weber melihat dalam kadar tertentu sebagai tujuan pertentangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Lebih jelasnya Weber melihat dalam kadar tertentu sebagai tujuan pertentangan itu sendiri; ia berpendapat bahwa pertentangan untuk memperoleh kekuasaan tidaklah terbatas hanya pada organisasi-organisasi politik formal, tetapi juga terjadi di dalam setiap tipe kelompok seperti organisasi keagamaan dan pendidikan.

Kedua, adalah tipe konflik dalam hal gagasan dan cita-cita. Ia berpendapat bahwa orang seringkali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam hal pandangan dunia mereka, baik itu berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial ataupun konsepsi tentang bentuk gaya hidup cultural yang terbaik. Lebih dari itu, gagasan cita-cita tersebut bukan hanya dipertentangkan, tetapi dijadikan senjata atau alat dalam pertentangan lainnya, misalnya pertentangan politik. Jadi orang dapat berkelahi untuk memperoleh kekuasaan dan pada saat yang sama, berusaha saling meyakinkan satu sama lain bahwa kekuasaan itu yang mereka tuju tetapi kemenangan prinsip-prinsip yang secara etis dan filosofis benar.

Dengan demikian jelaslah bahwa Weber bukan seorang materialis ataupun idealis. Ia biasa disebut para sosiolog modern sebagai contoh seseorang pemikir yang mengkombinasikan pola penjelasan materialis dan idealis dalam pendekatan sosiologis yang bersifat menyeluruh. Lebih jauh, Weber berpendapat bahwa gagasan bukanlah semata-mata hasil dari kondisi-kondisi material yang ada, tetapi keduanya seringkali signifikan kausalnya sendiri-sendiri.

Perbedaan pendapat antara Marx dan Weber: (1) Marx berpendapat bahwa karena konflik pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatan-kekuatan produksi. Karenanya begitu kekuatan-kekuatan ini dikembalikan kepada seluruh masyarakat, maka konflik dasar tersebut dapat dihapuskan. Jadi begitu kapitalis digantikan dengan sosialisme, maka kelas-kelas akan terhapuskan dan pertentangan kelas akan berhenti. (2) Weber memiliki pandangan yang jauh pesimistik. Ia percaya bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tak dapat dihilangkan. Dalam suatu tipe masyarakat masa depan, baik kapitalis, sosialis atau tipe lainnya orang-orang akan tetap selalu bertarung memperebutkan berbagai sumber daya. Karena itu Weber menduga bahwa pembagian atau pembelaan sosial adalah ciri permanen dari semua masyarakat yang sudah kompleks, walaupun tentu saja akan mengambil bentuk-bentuk dan juga tingkat kekerasan yang secara substansial sangat bervariasi (Nazsir, 2008).

Weber menyebut beberapa dari bidang-bidang nilai seperti agama, kekerabatan, politik, ekonomi, seksualitas, seni dan ilmu pengetahuan di mana antara bidang-bidang itu terdapat per-tentangan-pertentangan yang tidak dapat di cari sebabnya. Seperti dikutip Laeyendecker, yang merupakan soal bukanlah masalah-masalah, melainkan perjuangan mati-matian yang tidak dapat dijembatani, seperti antara Tuhan dan setan. Siapapun yang memilih satunya akan bertubrukan dengan lainnya. Konsekuensinya, tidak ada ukuran nilai yang umum. Kebudayaan-kebudayaan misalnya, dapat dibandingkan tetapi tidak dapat diukur satu dengan yang lain (Imam, 2012: 76).

5. Sejarah Konflik Ralf Dahrendorf (1929-2009)

Seperti fungsionalis, ahli teori konflik berorientasi ke studi struktur dan institus sosial. Sedikit sekali pemikiran teori ini yang berlawanan secara langsung dengan pendirian fungsionalis. Antitesis terbaiknya ditunjukkan oleh karya Dahrendorf (1958, 1959). Dalam karya Dahrendorf, pendirian teori konflik dan teori fungsional disejajarkan. Menurut para fungsionalis, masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah secara seimbang. Tetapi menurut Dahrendorf, dan teoritisi konflik lainnya, setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. Fungsionalis menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teoritisi konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Fungsionalis menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Teoritisi konflik melihat berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan (Ritzer dan Goodman, 2008: 153).

Dahrendorf (1959,1968) adalah pendukung utama pendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan oleh karena itu teori teori sosiologis harus dipecah ke dalam dua bagian, teori konflik dan teori konsensus. Para teoritisi konsensus harus

mengkaji nilai integrasi di dalam masyarakat, dan teoritis konflik harus mengkaji konflik-konflik kepentingan dan paksaan yang menjaga kesatuan masyarakat di dalam menghadapi tekanan-tekanan itu. Dahrendorf menyadari bahwa masyarakat tidak bisa ada tanpa konflik dan konsensus, keduanya merupakan persyarat satu sama lain. Oleh karena itu, tidak akan ada konsensus mendahuluinya (Ritzer, 2012: 450).

Dahrendorf sangat dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural. Ia menyatakan bahwa menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau oleh konsensus bersama atau oleh kedua-duanya. Tetapi menurut teoritis konflik (atau teoritis koersi) masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Faktat kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis” (Ritzer dan Goodman, 2008: 154).

6. Sejarah Konflik Lewis Alfred Coser (1913)

Selama lebih dari dua puluh tahun Lewis A. Coser tetap terikat pada model sosiologi dengan tertumpu kepada struktur sosial. Pada saat yang sama dia menunjukkan bahwa model tersebut selalu mengabaikan studi tentang konflik sosial. Berbeda dengan beberapa ahli sosiologi yang menegaskan eksistensi dua perspektif yang berbeda (teori fungsionalis dan teori konflik), Coser mengungkapkan komitmennya pada kemungkinan menyatukan kedua pendekatan tersebut. Akan tetapi para ahli sosiologi kontemporer sering mengacuhkan analisis konflik sosial, mereka melihatnya konflik sebagai penyakit bagi kelompok sosial. Coser memilih untuk menunjukkan berbagai sumbangan konflik yang secara potensial positif yaitu

membentuk serta mempertahankan struktur suatu kelompok tertentu. Coser mengembangkan perspektif konflik karya ahli sosiologi Jerman George Simmel.

Coser terkenal karena pandangannya bahwa konflik mempunyai fungsi positif bagi masyarakat. Ia mengembangkan sejumlah proposisi mengenai fungsi konflik atas dasar asas yang ditegakkan oleh tokoh teori konflik lain, Georg Simmel. Menurut definisi kerja Coser konflik adalah perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau menenyapkan lawan. Kajian Coser terbatas pada fungsi positif dari konflik, yaitu dampak yang mengakibatkan peningkatan dalam adaptasi hubungan sosial atau kelompok tertentu (Sunarto, Jakarta: 231).

Selama lebih dua puluh tahun Lewis A. Coser tetap terikat pada model sosiologi dengan tekanan pada struktur sosial. Pada saat yang sama dia menunjukkan bahwa model tersebut selalu mengabaikan studi tentang konflik sosial. Coser mengakui beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dan konsensus, suatu proses yang ditonjolkan oleh kaum fungsional struktural, tetapi dia juga menunjuk pada proses lain yaitu konflik sosial.

Coser (1956: 16-19), dalam membahas ahli teori (bangsa Amerika) yang lebih awal, menyatakan pemahaman mereka tentang konflik sebagai kesadaran yang tercermin dalam semangat pembaharuan masyarakat. Albion Small dan George E. Vincen sebagai pengarang terkenal buku teks pertama sosiologi Amerika. Akan tetapi para ahli sosiologi kontemporer sering mengacuhkan analisa konflik sosial, secara implisit melihatnya sebagai destruktif atau patologis bagi kelompok sosial. Coser memilih menunjukkan berbagai sumbangan konflik yang secara potensial positif untuk membentuk serta mempertahankan struktur. Dia melakukan hal ini dengan membangun di atas sosiologi klasik pernyataan-pernyataan yang berhubungan konflik sosial, dan terutama melalui kepercayaan pada ahli sosiologi Jerman yang terkenal yaitu George Simmel.

7. Sejarah Konflik Johan Vincent Galtung (1930)

Pendekatan multidisipliner ini diperlihatkan oleh Galtung dalam penjelasannya mengenai intervensi konflik. Menurut Galtung intervensi harus dilakukan secara netral. Posisi ini merupakan ciri dari mazhab positivis. Namun demikian Galtung pun menyarankan perubahan-perubahan tertentu dilakukan untuk menciptakan hubungan konflik yang konstruktif melalui intervensi yang netral. Galtung menyebutnya sebagai pendekatan *transcend method* (Galtung, 2000: 51-52).

Analisis konflik multidisipliner diperlihatkan oleh Galtung dalam penjelasannya mengenai intervensi konflik. Menurut Galtung intervensi harus dilakukan secara netral. Posisi ini merupakan ciri dari mazhab positivis. Namun demikian, Galtung pun menyarankan perubahan-perubahan tertentu dilakukan untuk menciptakan hubungan konflik yang konstruktif. Pendekatan ini yang kemudian disebut sebagai *transcend approach* (Rombostham, Wood, dan Miall, 2003: 10, Galtung, 2017).

Salah satu sumbangan sosiologi konflik Galtung memperlihatkan berbagai individu, kelompok dan organisasi membawa angka kepentingannya masing-masing. Kepentingan bisa berwujud dalam bentuk ekonomis maupun politis. Dua kelompok sosial dengan kepentingan ekonomis dalam satu lingkungan yang sama, misalnya dua kelompok pedagang yang di pasar, masing-masing akan menciptakan persepsi terhadap kepentingan kelompok di luarnya.

Segitiga konflik berfungsi untuk mengetahui gejala konflik yang terlihat dan yang tidak terlihat. Konflik yang terlihat adalah proses terjadinya kekerasan itu sendiri serta dampak yang di timbulkan. Gejala yang tidak terlihat antara lain disebabkan oleh kekerasan budaya dan kekerasan struktural. Kekerasan budaya bisa berupa hukum adat, mitos, anarkis, suka

kebencian kuno, sedangkan kekerasan struktural bisa berupa kemiskinan dan kebudayaan. Teori garis waktu adalah untuk mengetahui perkembangan konflik dari waktu ke waktu. Setiap konflik mempunyai catatan sejarah. Sejarah itu bertujuan memudahkan untuk menyusun laporan karena memiliki latar belakang. Menurut Johan Galtung teori segitiga konflik, dia mengatakan bahwa konflik dapat dilihat sebagai sebuah segitiga, dengan kontradiksi (C), sikap (A) dan perilaku (B).

Galtung berpendapat bahwa tiga komponen harus muncul bersama dalam sebuah konflik total. Sebuah struktur konflik tanpa sikap atau perilaku konflikual merupakan sebuah konflik laten atau konflik struktural. Galtung melihat konflik sebagai proses dinamis, dimana struktur, sikap, dan perilaku secara konstan berubah dan saling mempengaruhi. Ketika konflik muncul, kepentingan pihak-pihak yang bertikai masuk dalam konflik atau hubungan dimana mereka berada menjadi penindas. Kemudian pihak-pihak yang bertikai mengorganisasi diri di sekitar struktur ini untuk mengejar kepentingan mereka. Mereka mengembangkan sikap yang membahayakan dan perilaku konflikual. Dengan begitu, formasi konflik mulai tumbuh dan berkembang. Sebagaimana yang biasa terjadi, konflik dapat melebar, menimbulkan konflik sekunder pada pihak-pihak utama, atau pihak-pihak luar yang sekarang terseret masuk. Hal ini sering kali merumitkan tugas menyelesaikan konflik asal atau konflik inti. Bagaimanapun juga, pada akhirnya penyelesaian konflik harus melibatkan seperangkat perubahan dinamis, yang melibatkan penurunan perilaku konflik, perubahan sikap, dan mentransformasikan hubungan atau kepentingan yang berbenturan yang berada dalam inti struktur konflik (Liliweri, 2005 : 316).

8. Sejarah Konflik Randal Collins (1941)

Tokoh utama dalam upaya membangun teori konflik yang lebih sintesis dan integratif adalah Randall Collins. *Conflict Sociology* karya Collins (1975) sangat integratif karena jauh lebih berorientasi mikro ketimbang teori konflik makro Dahrendorf dan yang lainnya. Mengenai karya awalnya ini, Collins mengatakan: Kontribusi utama untuk teori konflik adalah menambah analisis tingkat mikro terhadap teori yang bertingkat makro ini. Saya terutama mencoba menunjukkan bahwa stratifikasi dan organisasi didasarkan atas interaksi kehidupan sehari-hari.

Dari awal Collins (1975) menjelaskan bahwa perhatiannya terhadap konflik tidak akan bersifat ideologis; yakni, dia tidak mengawali dengan pandangan politis bahwa konflik adalah baik atau buruk. Dia mengatakan bahwa dia memilih konflik sebagai fokus berdasarkan landasan yang realistis, yakni bahwa konflik adalah proses sentral dalam kehidupan sosial.

Berbeda dari teoritis lainnya yang memulai dan tetap menganalisis level kemasyarakatan, Collins mendekati konflik dari sudut pandang individu karena akar teoritisnya terletak dalam fenomenologi dan etnometodologi. Meski ia lebih menyukai teori berskala kecil dan bertingkat individual, Collins menyadari bahwa sosiologi tidak akan berhasil hanya berdasarkan analisis tingkat mikro saja. Teori konflik tak bisa berbuat apa-apa tanpa analisis tingkat kemasyarakatan. Tetapi, sementara sebagian besar teoritis konflik percaya bahwa struktur sosial berada di luar (eksternal) dan memaksa pihak aktor, Collins cenderung melihat struktur sosial tak dapat di pisahkan dari aktor yang membangunnya, dan yang mana pola interaksinya adalah esensi struktur sosial. Collins cenderung melihat struktur sosial lebih sebagai pola interaksi ketimbang sebagai kesatuan eksternal dan imperatif. Selain itu, sementara sebagian besar teoritis konflik melihat aktor dipaksa oleh kekuatan eksternal, Collins berpendapat bahwa aktor terus-menerus menciptakan ulang organisasi sosial.

Collins mengatakan bahwa perselisihan relatif jarang terjadi, apalagi perusakan fisik. Kondisi yang terjadi hanya manuver untuk memisahkan hubungan organisasi. Teori konflik sama sekali tidak meninggalkan teori solidaritas sosial, cita-cita sosial, sentiment sosial, dan perasaan. Mengacu pada Simmel, Collins berpendapat bahwa kekuasaan, otoritas atau pengaruh merupakan sifat dari suatu proses interaksional, bukan merupakan sifat dari kepribadian individu.

Poin yang terpenting adalah teori konflik menurut Collins tidak menganalisis cita-cita dan moral sebagai kesucian selama memberikan hasil dari analisa sosiologi. Adapun ahli teori konflik seperti Marx dan Engels, melihat kondisi di mana ide-ide dan cita-cita dinyatakan, bagai-mana dan kapan mereka menciptakan solidaritas, kapan mereka bermaksud mendominasi dengan memberikannya aturan-aturan atau undang-undang, dan kapan semua proses ini disusun. Selama membuat perlawanan atau konflik member jalan untuk jenis analisis ini dengan konsep dari sarana produksi material dan intelektual. Hal ini telah diperluas bukan hanya sebagai sebuah ana-lisis dari semua kondisi organisasi yang menciptakan ide-ide, melainkan juga sampai pada sebuah analisis dari apa yang disebut sarana produksi emosional.

Teori konflik Collins lebih sintetis dan integratif, karena arus orientasinya cenderung ke mikro. Meskipun kecenderungannya pada mikro, namun Collins mulai dengan teori besar dari Marx dan Weber sebagai pedoman untuk analisisnya. Dia mulai dari prinsip Marxian, alasannya ia ingin mencoba memodifikasi kasus sebagai dasar untuk pengembangan sebuah konfliknya.

9. Konsep Perang Suku

Perang suku adalah suatu perang yang berlangsung antara dua pihak baik secara

berseku-tu atau tidak dengan dasar keberpihakan adalah alasan kesukuan. Berbeda dengan perang konvensional, alasan perang suku biasanya adalah berdasar perebutan sumber makanan atau perebutan tanah ulayat. Dan keputusan perang atau damai serta pemimpin jalannya peperangan biasanya dipimpin oleh seorang kepala suku. Walau mengakibatkan korban jiwa atau luka-luka tetapi sebuah perang suku lebih mirip sebuah tawuran.

Pada zaman modern sebuah perang suku akan segera ditengahi dan dilerai oleh pihak keamanan, karena sebuah suku biasanya sekarang dibawah naungan sebuah pemerintahan yang berdaulat. Pada zaman dahulu pihak yang kalah dari sebuah perang suku biasanya akan dimusnahkan, diperbudak atau diusir oleh pihak yang menang, tetapi pada zaman modern hasil dari sebuah perang suku tidak mengubah peta teritorial atau keuntungan finansial apapun. Perang suku sekarang hanya berlangsung di suku-suku tradisional di Papua, Afrika dan suku Indian di hutan Amazon, Sedangkan perkelahian antar suku berdasar fanatisme suku di daerah perkotaan sering dikategorikan tawuran atau perkelahian geng (https://id.wikipedia.org/wiki/perang_suku).

Seorang sosiolog Homans (1974 : 111-112) menjelaskan, pekerjaan seorang individu, apabila berhasil akan menutupi kesempatan penghargaan kepada orang lain. Soalnya keduanya tidak dapat memperoleh penghargaan itu bersama-sama dan terja-dilah kompetisi. Menghalang orang lain mendapat penghargaan akan menimbulkan frustasi. Lalu kompetisi cenderung menimbulkan permusuhan karena ada pembenaran untuk menyerang lawan. Kesukaran yang kita jumpai dalam mencegah kompetisi walaupun dalam permainan men-unjukkan betapa kuatnya kecenderungan permusuhan tersebut.

Sementara itu kelompok-kelompok, seperti juga perorangan bisa saja saling bersaing. Dalam hal ini, anggota-anggota suatu kelompok yang berani menolak menghargai kelompok lain, tidak hanya cenderung meningkatkan permusuhan, tetapi juga secara relatif meningkatkan penghargaan dari anggota kelompoknya sendiri (kelompok dalam atau *in group*); serta

cenderung meningkatkan rasa saling menyenangkan di antara mereka. Otomatis ia semakin tergantung kepada mereka untuk penghargaan. Peningkatan itu berubah sesuai dengan keberhasilan kelompoknya dalam persaingan terhadap kelompok lain. Pemimpin-pemimpin kelompok, diketahui kerap mengeksploitasi kecenderungan ini. Mereka mencoba untuk meningkatkan permusuhan antara kelompok mereka sendiri dengan kelompok lain, karena pada saat yang sama akan meningkatkan ketergantungan dan kesetiaan dari pada pengikutnya (Sudagung, 2001 : 31-32).

Konflik antaretnis bersifat alamiah, juga merupakan gejala yang sangat tipikal dari relasi antarmanusia (*human relationships*) yang terjadi pada setiap level, mulai dari level antarpribadi (psikologis) hingga level global. Konflik pada setiap level sangat signifikan dengan dinamika kebersamaan. Ini mendorong mereka yang terlibat untuk menguji para pihak melakukan perban-dingan. Orang yang terlibat dalam konflik antar etnik terdorong melakukan konflik, karena mereka mempunyai satu (bahkan satu-satunya) minat atau nilai bersama yang diperebutkan. Kebutuhan bersama yang tidak bisa dipertemukan itulah yang dijadikan tantangan bersama.

Konflik etnik (intraetnik maupun antaretnik) umumnya berlaku antara etnik mayoritas dan etnik minoritas, meskipun di sana-sini diwarnai oleh faktor-faktor sosial maupun kultural, seperti agama, pendidikan, pendapatan, kesejahteraan, status sosial ekonomi, dominasi budaya dan lain-lain. Konflik etnik sering diiringi oleh kekerasan yang berlangsung dalam satuan ruang (geografis dan kultur) serta periode tertentu. Umumnya mereka yang terlibat konflik merasakan, bahkan yakin bahwa mereka kurang puas karena kebutuhan dasar mereka tidak dipenuhi. Tambahan lagi, minoritas cenderung yakin bahwa identitas mereka tidak diakui karena kepentingan-an mereka tidak diperhatikan, harapan mereka sering disepelekan, kebudayaan mereka tidak pernah diperhitungkan. Sebaliknya, mayoritas sering merasa bahwa kehadiran kelompok minori-tas mengancam, apalagi kalau ada pemimpin minoritas yang

bekerja sama dengan kelompok musuh. Ini membuat mayoritas kerap merasa bahwa kehadiran minoritas merupakan ancaman terhadap keamanan.

Ketegangan yang meliputi konflik dapat tumbuh dari cara memandang sesuatu yang tidak signifikan, apalagi kalau masalah tersebut tidak dapat dipecahkan sehingga membangun argumen yang tiada berakir, disertai kemarahan dan kekerasan fisik yang permanen sehingga memisahkan relasi dua pihak. Tidak terpecahnya konflik itu menimbulkan destruksi sosial, personal, dan perilaku, dari yang sebelumnya profesional menjadi tidak profesional (Stuart & Sundeen, 1995 dalam Liliweri, 2005 : 252-253).

Tanah Papua merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menyimpan berbagai macam permasalahan sosial. Salah satu masalah sosial yang sampai sekarang telah ada dan masih terjadi adalah perang antar suku. Perang antar suku yang terjadi di tanah Papua pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Mimika sangat beragam dan mencakup semua lini kehidupan, mulai dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Perang antar suku yang terjadi di tanah Papua pada beberapa tahun belakangan ini juga tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut, utamanya adalah konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan suku, budaya dan golongan atau kelompok, sesuai dengan karakteristik dan dianggapnya sebagai salah satu permasalahan yang dapat merugikan dan mengganggu bahkan melanggar aturan dan norma yang berlaku pada suku-suku yang ada.

Masalah perzinahan atau perselingkuhan, pembunuhan, kematian tidak wajar, dan rasa dendam yang mendalam merupakan salah satu penyebab perang suku di daerah Papua. Disamping itu perang antar suku yang terjadi di waktu lampau juga menjadi salah satu faktor penyebab perang suku dan kelompok di daerah Papua yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik maupun materi. Perang antar suku dalam bahasa Dani disebut *wim* dan bahasa Amungme disebut *woem*, sebab perang suku yang terjadi adalah antara suku-suku asli Papua

yang mendiami daerah tersebut yaitu suku Dani, suku Nduga, suku Dem, suku Damal/Amungme, suku Moni, suku Wolani serta suku Ekari/Me, dan suku-suku lainnya. Suku-suku tersebut merupakan suku-suku yang mempunyai tradisi perang yang sangat kuat.

Kabupaten Mimika Provinsi Papua sangat di kenal atau identik dengan daerah konflik, karena konflik terjadi setiap pekan tidak ada hentinya. Konflik yang acapkali terjadi tidak hanya satu permasalahan akan tetapi sangat komplit atau berbagai latar belakang permasalahan yang berbeda di mulai dari konflik struktural, kepentingan (*interest*) dan fungsi atau peranan. Lebih sering terjadi perang antar suku atau perang adat sangat bervariasi tidak hanya satu suku, namun sebagian besar suku yang ada di Mimika keterlibatan dalam perang antar suku tersebut, misalnya perang suku antara suku Dani dengan suku Damal, suku Amungme dengan suku Dani, suku Damal dengan suku Nduga, suku Dani dengan suku Moni dan seterusnya.

Sejak tahun 1997 itulah Kabupaten Mimika diperkenalkan perang antar suku atau perang adat, akan tetapi sebelumnya sejak nenek moyang hingga tahun 1990-an belum pernah terdengar terjadi perang antar suku, namun yang ada adalah perang antar keluarga atau perang antar klan dari satu suku. Nama perang-perang antar klan yang terkenal di wilayah Amungsa antara lain adalah Woem Talang, Woem Tanat, Woem Tsingogong Narewal, Woem Kelawodigal, Hoya Woem dan lain sebagainya. Nama-nama perang tersebut di atas yang terjadi di wilayah Amungsa merupakan perang antar klan atau perang antar keluarga. Perang tersebut masa perang biasanya lama dan menghabiskan banyak korban nyawa, lalu penyelesaiannya pun sangat cepat dan mudah diselesaikan melalui hukum adat setempat.

Dalam buku Kal Muller (2009), begitu praktek perang antar suku dimulai peperangan ini tidak dapat dihentikan, karena masyarakat yang membangun populasi seimbang dengan peperangan bukan sebagai simbol kehebatan kaum lelaki itu, akan dikumpulkan dan dihancurkan oleh tetangga mereka yang lebih agresif. Pada daerah dimana politik berkisar

seputar orang-orang besar, maka pada pemimpin ini akan berjuang untuk mempertahankan kepemimpinan yang tidak stabil tersebut dengan mendorong warga mereka untuk maju bertarung di medan perang, yang melemahkan komunitas lawan mereka dan dengan demikian dapat menghilangkan ancaman akan otoritas dan dominasi mereka. Di banyak kelompok PNG, ritual-ritual inisiasinya panjang, sulit, dan menyakitkan. Ini dimaksudkan untuk membuat anak-anak lelaki menjadi prajurit tangguh. Tapi pada masyarakat lain dimana peperangan itu selalu ada, inisiasi kaum lelaki bisa tidak ada atau cukup lunak. Beberapa pengamatan ini berlaku di Papua, tetapi secara umum dan garis besar, tidak ada satu teori pun yang dapat diterapkan bagi peperangan. Satu-satunya alasan umum yang diberitahukan tentang perang adalah bahwa peperangan diperlukan sebagai balas dendam dan agar sejumlah kecil lelaki dapat mengumpulkan kekuasaan dan wibawa yang membawa mereka kepada status kepemimpinan.

Perang antar suku dipraktikkan pada berbagai tingkatan di seluruh dataran tinggi Papua. Meski kebanyakan perang resmi telah berhenti pada tahun 1970 an, peperangan masih terus berlanjut di beberapa daerah, tapi dalam skala yang jauh berkurang. Masih ada dendam yang harus diselesaikan, bahkan dari generasi-generasi sebelumnya. Kematian mengenaskan menuntut pembunuhan untuk menyamakan kedudukan. Di wilayah perbatasan PNG, perdamaian dijaga oleh petugas patroli Australia yang dibantu sejumlah kecil polisi bersenjata api. Sejak kemerdekaan dan tidak lagi ada petugas patroli, para polisi kebanyakan tidak sanggup atau keberatan untuk menghentikan perang antar suku yang timbul kembali di dataran tinggi. Dan sekarang digunakan senjata api, menimbulkan jenis pertempuran baru yang sangat berbeda daripada per-tempuran di masa lalu, saat hanya memakai senjata tradisional (Muller, 2009 : 151-153).

Ada dua pertempuran yang termasuk di dalam peperangan dataran tinggi Papua masa lalu. Peperangan skala besar di antara dua kelompok besar kaum lelaki, pada waktu dan tempat

yang telah ditentukan dan berlangsung dalam waktu terbatas. Pertempuran dapat dihentikan jika hujan mengurangi semangat perang atau merusak riasan badan yang rumit. Lelaki tua, wanita, dan anak-anak diluar jangkauan peperangan ini. Beberapa luka serius atau satu kematian biasa-nya sudah cukup untuk menghentikan salah satu dari pertempuran ini.

Jenis peperangan lainnya, pengroyokan, sama sekali tidak menarik. Dimana semua anggota kelompok musuh boleh diserang. Terkadang keseluruhan desa dihancurkan dan banyak dari mereka yang tidak bisa kabur dengan cepat dibunuh tanpa belas kasihan meski wanita-wanita muda sering kali dibiarkan hidup untuk dijadikan isteri tambahan bagi para pemenang. Namun demikian, beberapa aspek perang dianggap orang luar sebagai keterlaluan, jarang atau bahkan tidak pernah dipraktikkan di dataran tinggi Papua. Kita tidak pernah melihat referensi tentang pemburuan kepala dan kanibalisme secara tidak umum atau meluas (Muller, 2009 : 154).

Berkaitan dengan perang-perang yang kerap terjadi di Kabupaten Mimika, salah satunya perang antar suku yang pernah terjadi di areal Freeport pada 16 Oktober 2007 sampai dengan 30 Januari 2008 antara suku Dani dan Damal dengan suku Amungme. Jika mencermati masalah secara mendalam bahwa sesungguhnya perang tersebut bukan dengan suku Amungme, tapi persoalan ini seharusnya suku Dani dan Damal dengan Freeport, karena penyebab kematian pemuda itu di kejar oleh karyawan Freeport *security*. Namun, dari kubu kampung Kembeli langsung melakukan penyerangan terhadap suku Amungme. Sikap dan tindakan yang diambil gabungan dari suku Dani dan Damal, kalau dicermati secara mendalam lebih cenderung kepada kecemburuan sosial yang sudah lama tersimpan dan kesempatan itu pula siap untuk meledak. Hanya saja satu atau dua orang dari suku Dani dan suku Damal yang memprovokasi kelompok yang besar atau kelompok lain (kelompok sesama). Sebab mereka menilai dan menganggap bahwa setiap program yang dijalankan oleh Freeport untuk masyarakat setempat, hanya suku Amungmelah yang menikmati sementara kami suku lain

tidak menikmati. Nah, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang kemudian sudah melekat pada benak mereka (dari kubu Kembeli atau suku Dani dan suku Damal), itulah yang menjadi dasar kuat atau pegangan mereka untuk melakukan serangan dan melahirkan konflik perang antar suku.

Gabungan dari suku Dani dan suku suku Damal langsung menghadang atau melakukan serangan terhadap suku Amungme, padahal sesungguhnya masalah yang terjadi sebenarnya adalah antara Freeport dengan suku Dani dan suku Damal tersebut. Kemungkinan ada beberapa pertimbangan bahwa jika mereka langsung berhadapan dengan Freeport sangat sulit dan kurang tepat bagi mereka, kemudian mereka beranggapan bahwa suku Amungme merupakan bagian daripada Freeport, sehingga harus berhadapan dengan suku Amungme itulah yang muncul dibenak mereka. Mereka (suku Dani dan suku Damal) beranggapan bahwa suku Amungme diperhatikan secara penuh oleh Freeport, sementara suku yang lain tidak diperhatikan. Tetapi kenyataannya hasil kekayaan alam yang dikelola oleh Freeport, tentu tujuh suku dapat porsi yang sama yaitu tujuh suku sama-sama berobat gratis dirumah sakit yang ada di Banti maupun Timika, memperoleh beasiswa melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAMK), ada kebebasan untuk melakukan usaha menggunakan dana pengembangan ekonomi masyarakat melalui biro-biro masing-masing dari LPMAMK. Hanya saja pembangunan tiga desa yang di khususkan untuk tiga desa yakni desa Banti, Arwanop dan Tsinga.

Inilah yang barangkali sebagai landasan mereka untuk melakukan perang dengan suku Amungme, karena mereka merasa bahwa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan sesuatu yang lebih sesuai dengan apa yang menjadi hak mereka itulah yang menjadi tuntutan bagi mereka. Sebab mereka mengetahui bahwa masyarakat yang tinggal paling dekat dengan areal Freeport seperti desa Waa/Banti, Arwanop dan Tsinga. Untuk desa-desa tersebut Freeport mem-perhatikan lebih khusus melalui program Tiga Desa, dalam program ini PTFI

menyediakan bangun-bangunan pemukiman (rumah kayu), gedung sekolah, gedung gereja, jembatan, lapangan terbang, dan lain sebagainya.

Kecemburuan sosial seperti ini di rasakan atau diketahui oleh orang tertentu, kemudian bisa melakukan secara persuasi dan memprovokasi kepada kelompoknya. Apa yang dipikir dan disampaikan oleh seseorang (provokator) kepada kelompok yang besar, kemudian kelompok yang besar tersebut, sudah meyakinkan atau disepakati bersama dalam satu suku itu, sehingga sangat mudah untuk meledak atau menimbulkan perang antar suku. Setiap perang yang terjadi di Kabupaten Mimika, bukan perang suku melainkan bisa disebut perang antar saudara/perang antar keluarga. Namun, lebih terkenal dan sering menyebutnya perang suku, baik melalui media massa, elektronik, media cetak dan informasi-informasi lain menyebutnya perang suku. Disebut perang saudara/keluarga, karena perang antar suku misalnya perang antara suku Dani dan Damal dengan suku Amungme dalam perang tersebut, dua atau tiga orang dari suku Amungme bisa bergabung dengan suku Dani dan Damal dan juga sebaliknya suku Dani dan Damal bisa bergabung dengan suku Amungme. Kemudian contoh yang lain, misalnya beradik dan kaka dari suku Amungme adiknya bisa bergabung dengan suku Dani dan Damal dan sebaliknya suku Dani dan Damal, seperti inilah yang disebut perang antar saudara/keluarga. Dan juga satu suku yang bikin dua kubu atau antara adik dengan kaka kerap terjadi perang.

Dalam perang suku berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2007 sampai dengan 30 Januari 2008, selama empat bulan berlangsung. Perang suku itu menelan korban jiwa 14 orang dan luka-luka sekitar 500-an lebih jiwa. Salah satunya Ibu Rumah Tangga atas nama Ibu Naoerungao yang meninggal karena akibat terkena peluru dari aparat keamanan. Ketika itu Ibu-ibu pernah melakukan unjuk rasa di depan kantor koramil di kampung Kembeli dengan tuntutan bahwa aparat keamanan segera amankan atau hentikan perang antar suku itu, sebab akses jalan satu-satunya yang ibu-ibu mau pergi ke pasar, tapi jalan itu di jadikan arena perang, sehingga ibu-ibu mengalami kesulitan untuk mendapat makanan. Oleh karena itu, ibu-ibu

mengandalkan aparat keamanan untuk dimintakan segera mengamankan perang suku yang berlangsung itu. Sehingga ibu-ibu berinisiatif untuk melakukan berunjukrasa di depan kantor koramil tersebut. Namun, aparat keamanan mengeluarkan tembakan peluru ke arah ibu-ibu yang sedang berdemo atau berunjukrasa akibatnya salah satu ibu pendemo tewas (Kum, 2015 : 104-106).

Perang suku di Kwamki Lama, Kabupaten Mimika, sejak awal dirancang oleh PT FI. Dengan tujuan masyarakat sibuk dengan perang suku dan dengan damai tenang di bawah penguasaan TNI-POLRI melakukan eksploitasi SDA di tanah Amungsa Papua. Kepentingan negara dengan memelihara perang suku ini antara lain: *pertama*, melakukan operasi terbatas di Kwamki Lama dengan tuduhan sebagai basis TPN-OPM. *Kedua*, membangun opini publik nasional maupun internasional bahwa di Papua masih terjadi perang suku yang masih primitif. Sehingga orang Papua belum bisa merdeka dan berdaulat secara penuh sebagai sebuah bangsa dan negara. *Ketiga*, proses pembunuhan dan pemusnahan orang Papua. Perang suku menjadi strategi aparat keamanan untuk melemahkan kekuatan, tanpa dituduh melanggar hak asasi manusia. Target dari perang suku agar perang suku tidak mengkritisi pembangunan di kota Timika dan memprihatinkan. Karena, masyarakat sibuk dan menghabiskan energy untuk berperang melawan suku lain. Sangat jarang bupati memelopori perdamaian di antara kedua belah pihak yang bertikai (Haluk, 2013 : 220-221).

10. Sebab-Sebab Perang Antar Suku

a. Sikap Kecurigaan

Salah satu sebab perang antar suku atau peran adat di Kabupaten Mimika di antaranya adalah kecurigaan (*Hinak iyek atengam nat-a*). Hal ini merupakan suatu sikap atau

pengambilan keputusan (*decision making*) yang di ambil oleh setiap individu atau kelompok masyarakat yang kurang tepat. Perbuatan-perbuatan yang tidak terstruktur dan tidak terhormat terhadap sesama yang selalu dilakukan oleh masyarakat di sana. Artinya, sikap dan mental seseorang terhadap yang lain sangat tidak dipercaya atau saling tidak percaya antara sesama mereka. Berdasarkan hal inilah yang kemudian kerap kali muncul perang antar suku atau perang adat.

Dari sikap kecurigaan di dukung dengan tuduhan yang tinggi, sehingga kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Seseorang yang memiliki sikap kecurigaan yang tinggi atau dipengaruhi dengan sikap kecurigaan, meskipun mereka tidak/belum memiliki bukti secara autentik. Seperti misalnya hasil otopsi dari pihak rumah sakit dan pihak kepolisian. Tapi mereka (masyarakat) tidak yakin dengan hasil tersebut, karena sudah menguasai atau memnuhi dirinya dengan sikap kecurigaan yang tinggi. Dengan demikian maka dampak dari kecurigaan itulah yang kerap kali menimbulkan konflik berkepanjangan kemudian sangat sulit menciptakan harmonisasi, kenyamanan, kerukunan, dan ketenangan dalam kehidupan sosial.

b. Sikap Egoisme

Sikap egoisme dalam penulisan ini, bahwa dalam kehidupan masyarakat belum memiliki berinteraksi yang baik atau tidak hendak saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahkan tidak saling membutuhkan, sehingga mau membuat apa saja bebas. Terutama terkait dengan sejak dulu kehidupan masyarakat suku Amungme dan masyarakat pegunungan tengah pada umumnya, tempat tinggal masyarakat ini terpencar hidup sendiri-sendiri per keluarga. Dan mereka menganggap bahwa di alam ini tidak ada orang lain, yang ada adalah dirinya saja.

Hal ini terjadi karena memang belum tahu dunia lain, sehingga ketika itu masyarakat saling ketemu antara masyarakat yang satu dengan yang lain pasti saja terjadi perang.

Berkaitan dengan konflik berkepanjangan yang kerap terjadi di Papua, berawal dari perilaku atau perbuatan sorang individu. Individu yang biasanya hidup sendirian, tidak suka berinteraksi dengan sesama yang lain, tidak pernah berkumpul bersama-sama dalam kelompok, tidak pernah melibatkan dalam kesatuan masyarakat atau dalam organisasi masyarakat, tidak pernah menghadiri pertemuan-pertemuan penting yang kaitannya dengan kepentingan bersama masyarakat setempat, pokoknya melakukan cuekan dengan segala sesuatu yang sebenarnya kepentingan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, maka masyarakat individu yang kehidupannya seperti yang di jelaskan di atas, inilah yang kemudian menimbulkan atau menciptakan konflik. Tapi persoalannya adalah semua masyarakat melibatkan meskipun sepele masalahnya yang bisa menyelesaikan dalam keluarga itu sendiri.

c. Konflik Nilai

Kebanyakan konflik terjadi karena perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan dan tindakan seseorang. Anda katakan nilai itu sesuatu yang prinsip, dan prinsip itu tidak boleh dilanggar. Konflik terjadi, karena dua pihak memberikan nilai yang berbeda atas apa yang menjadi objek konflik.

d. Komunikasi yang Kurang Efektif

Jangan anggap sepele komunikasi antar manusia, karena dapat mengakibatkan konflik. Keadaan ini mendorong dua pihak menjadi cemas, mungkin pula takut sehingga mulai bertanya

dia atau saya yang harus lebih dahulu berkomunikasi. Yang masuk dalam kategori ini adalah konflik makna informasi. Artinya, dua pihak atau lebih memberi makna yang berbeda secara diametral atas suatu informasi tentang apa yang menjadi sasaran konflik (Kum, 2009). Komunikasi merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam kehidupan sosial karena pemahaman dan kesepakatan dapat dicapai dengan melalui komunikasi antara satu pihak dan pihak yang lain, baik dalam tataran individu, komunitas, maupun dalam konteks yang lebih luas (Bakti, 2019: 2).

Komunikasi yang tidak sasaran atau tidak efektif yang kerap dilakukan oleh masyarakat, sehingga sangat mudah menimbulkan konflik kerkepanjangan di tanah Papua. Dalam kehidupan masyarakat sangat berkembang pesat dengan informasi dan komunikasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi atau menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Misalnya saja pihak ke dua membawa informasi kepada pihak ketiga, celakanya adalah pihak ketiga begitu menerima atau mendapat informasi melalui komunikasi dari pihak kedua, tidak mencari tahu dulu, tetapi yang terjadi adalah langsung melakukan tindakan, meskipun informasi dari pihak kedua belum tentu benar sumbernya.

Kesalahan yang sering terjadi antara pihak kedua dengan pihak ketiga, karena pihak kedua memperoleh informasi dari pihak pertama yang tidak jelas sumbernya, dan juga pihak ketiga menerina informasi dari pihak kedua tidak mencari tahu dulu sumber informasinya. Namun, langsung mengambil keputusan untuk melakukan tindakan dan berujung pada konflik berkepanjangan, inilah yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat.

e. Kecemburuan Sosial

Pihak atau kelompok yang tidak puas dengan suatu hasil kekayaan alam yang dinikmati bersama yang dikelola langsung oleh PT Freeport Indonesia melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMK). Tentu saja bagi mereka-mereka yang merasa diri belum atau tidak puas dengan hasil tersebut, sehingga kemudian mereka mempengaruhi secara persuasif atau membujuk kepada kelompok yang dianggap belum menikmati hasil kekayaan alam yang dikelola oleh PTFI maupun LPMK, sehingga dengan mudah saling memprovokasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dengan kesalahpahaman seperti inilah yang akan mengakibatkan konflik berkepanjangan, padahal hasilnya sudah menikmati secara bersama-sama, terutama oleh tujuh suku, tidak ada yang diistimewakan.

Secara konkritnya bahwa bagi dua suku dan lima subsuku lainnya yang ada di Kabupaten Mimika yaitu suku Amungme dan suku Kamoro termasuk lima subsuku lainnya adalah suku Dani, suku Moni, suku Damal, suku Ekari/Mee dan suku Nduga. Sama-sama mendapatkan hak untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, peluang kerja dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pendanaan dari Freeport. Namun orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang merasa belum puas dengan hasil kekayaan tersebut, inilah yang selalu menciptakan konflik di Mimika Papua (Kum, 2009).

f. Pemerintah Daerah dan Hukum Positif yang Kurang Efektif

Mengapa konflik fisik terjadi di Mimika? Karena tidak ada penegakan hukum (positif) secara tegas di Kabupaten Mimika. Pemerintah, terutama penegak hukum (polisi dan jaksa) tidak mampu menegakkan hukum atau pemerintah tidak berwibawa. Dari konflik-konflik antara suku tersebut, para pelaku tidak pernah diproses sampai ke meja pengadilan. Beberapa pelaku pernah ditangkap tapi kemudian dibebaskan tanpa proses lebih lanjut. Beberapa pelaku lepas begitu saja meskipun terdapat bukti-bukti (unsur-unsur) pelanggaran. Dalam beberapa

kasus, pelepasan dilakukan setelah lobi-lobi dari masyarakat adat yang lebih memilih menerapkan hukum adat dari pada hukum positif. Misalnya adalah penyelesaian secara hukum adat tidak memberi efek jera kepada pelaku, malah pelaku di anggap pahlawan di komunitasnya.

Pemerintah dan penegak hukum pun terlalu sering mengikuti kemauan orang-orang yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah secara adat. Hal ini sah-sah saja, apabila masyarakat dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh sehingga tidak terjadi lagi konflik untuk jangka waktu panjang, baik oleh pemicu yang sama atau pemicu yang lain. Namun nyatanya, konflik selalu saja terjadi. Artinya, penyelesaian secara adat saja tidak bisa diandalkan lagi, karena itu hukum positif harus diterapkan. Dalam kasus tertentu pemerintah dan penegak hukum melepaskan pelaku karena takut akan ada konflik berkelanjutan. Pemerintah justru takut kepada rakyatnya, bukan rakyat yang tunduk kepada pemerintah disinilah terlihat bahwa pemerintah tidak berwibawa (Kum, 2009).

11. Konsep Resolusi Konflik

Hasil kajian yang telah dilakukan di daerah-daerah telah menunjukkan hal tersebut. Di daerah-daerah tertentu seperti Sumatera Barat yang masih mempertahankan tradisi yang sudah dipunyai sejak dahulu, penggunaan penyelesaian sengketa alternatif telah diperkuat melalui peraturan daerah dengan menekankan bahwa setiap sengketa dibidang pertanahan hendaknya selesaiakan terlebih dahulu melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebelum diajukan ke lembaga penyelesaian sengketa yang lain seperti pengadilan. Tetapi, di daerah-daerah lain kekekatannya dengan tradisi sudah mulai menurun, penggunaan ADR lebih bersifat pilihan, yaitu tergantung pada kemauan dari pihak yang bersengketa (Sumardjono, Ismail dan Isharyanto, 2008:9-11).

Dalam hal ini, penggunaan pihak ke tiga, ada empat peran mendasar yang dapat dimainkan oleh pihak ke tiga, yaitu:

- a. Mediator adalah pihak ke tiga netral yang mempermudah suatu pemecahan rundingan dengan menggunakan penalaran dan persuasi, menyarankan alternatif, dan sebagainya.
- b. Arbitrator adalah pihak ke tiga dengan otoritas memaksakan suatu persetujuan. Arbitrasi dapat bersifat sukarela (diminta) atau wajib (dipaksakan pada pihak-pihak oleh undang-undang atau kontrak). Otoritas arbitrator beraneka menurut aturan yang ditentukan oleh para perunding.
- c. Perujuk (konsiliator) merupakan pihak ke tiga terpercaya yang memberikan hubungan komunikasi informal antara perunding dengan lawannya. Dalam praktik, lazimnya perujuk bertindak sebagai lebih dari sekedar menjalankan komunikasi. Mereka juga melakukan penemuan fakta, penafsiran pesan, dan pembujukan mereka yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Konsultan adalah pihak ke tiga yang terampil dan tidak berat sebelah yang berupaya memudahkan pemecahan masalah lewat komunikasi dan analisis, yang dibantu oleh pengetahuannya mengenai manajemen konflik. (Wahjono, 2010:174-175).

Penyelesaian konflik antar etnis di Kabupaten Mimika, menggunakan hukum adat karena masyarakat menganggap hukum adatlah yang proses penyelesaiannya lebih cepat dari pada hukum positif. Di samping itu posisi pemerintah dan kepolisian sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antar suku, sehingga penyelesaian konflik antar suku tersebut lebih berperan pemerintah sebagai mediator.

Pluralisme budaya dalam multikulturalisme dan pluralisme budaya, kerap kali konflik terjadi karena setiap kelompok etnik tidak mengakui perbedaan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, setiap etnik akan mengangkat etniknya pada level superior dan

menjadikan etnik lain sebagai inferior. Model pluralisme ini dapat menolong kita melakukan resolusi konflik. Misalnya, untuk mengurangi konflik antaretnik, individu atau kelompok diajak memberikan reaksi tertentu terhadap pengaruh lingkungan sosial dengan mengadopsi kebudayaan yang baru masuk tersebut, itulah asimilasi antaretnik.

Di samping asimilasi, faktor yang membuat kita dapat menyelesaikan konflik antaretnik adalah akomodasi. Dalam proses akomodasi, dua etnik atau lebih yang mengalami konflik harus sepakat menerima perbedaan budaya, dan perubahan penerimaan itu harus melalui penyatuan penciptaan kepentingan bersama. Dengan akomodasi, maka orang-orang yang berbeda suku bangsa atau etnik dapat mengakui kebudayaan yang berbeda dalam masyarakat yang sama (Liliweri, 2005:321).

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat ternyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut dihadapan kepala desa. Dengan semangat” musyawarah untuk mencapai mufakat” yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia. Pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya undang-undang No. 30 Tahun 1999 (Winarta, 2011:11).

Tidak mudah untuk menentukan pilihan tindakan penyelesaian konflik sosial yang tepat bagi suatu sistem sosial disuatu kasus tertentu. Solusi konflik social pun tidak dapat berlaku

general, dalam arti sebuah rumusan yang berlaku bagi suatu sistem sosial akan berlaku juga bagi sistem sosial yang lain.

Secara umum strategi resolusi konflik sepantasnya harus dimulai dengan pengetahuan yang mencukupi tentang peta atau konflik sosial yang terjadi di suatu kawasan. Dengan berbekal peta tersebut segala kemungkinan dan peluang resolusi konflik diperhitungkan dengan cermat, sehingga setiap manfaat dan kerugiannya dapat dikalkulasi dengan baik. Seringkali dijumpai banyak kasus bahwa sebuah pilihan solusi tindakan rasional untuk mengatasi konflik sosial tidaklah benar-benar mampu menghapuskan akar persoalan konflik secara tuntas dan menyeluruh. Pada kasus-kasus yang demikian itu, maka resolusi konflik sepantasnya dikelola (*conflict management*) yang bisa berdampak sangat destruktif dapat dihindarkan (Arya Hadi, 2006).

Metode yang dipakai Sistem Peringatan dan Tanggapan Dini Konflik (SPTDK) ialah mencakup pembangunan jaringan warga di komunitas-komunitas. Artinya ia akan bekerja memonitoring isu-isu dan persoalan-persoalan konfliktual yang terjadi di wilayah masing-masing. Dalam proses itu akan dikembangkan forum-forum diskusi ditingkat komunitas. Melalui forum-forum ini warga secara bersamaan mengidentifikasi persoalan aktual dan mencari jalan-jalan pemecahan yang memungkinkan penyelesaian konflik. Dan penyelesaian konflik akan selalu berpatokan pada sprit perdamaian dan anti-kekerasan, serta merancang action-plan bila diperlukan dalam upaya pencegahan kekerasan (Malik, 2017: 247). Hal ini pula yang harus dipertimbangkan dalam proses resolusi konflik. Selama ini, teori kontemporer resolusi konflik banyak dikritik karena dianggap hanya bisa menyelesaikan konflik secara instan dan tidak bisa menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, apalagi mentransmisikan konflik secara positif (Perwita dan Sabban, 2015: 10).

Setiap penyelesaian yang menyangkut orang banyak termasuk dalam kasus tanah. Sehingga dalam melakukan menyelesaikan persoalan yang timbul dengan tanah harus dilakukan dengan berhati-hati, teliti dan harus melalui berbagai metode pendekatan yang komprehensif-multidimensi. Maka tidak jarang dalam menyelesaikan persoalan membutuhkan waktu yang relatif lama mengedepankan jalan keluar dan hasil yang sama-sama menguntungkan. Mendorong dan melibatkan masyarakat lokal untuk berperan sebagai motor perubahan secara langsung dengan mengedepankan dialog, menempatkan para pihak sebagaimana kedudukan sosialnya serta menggali aspek spritualitas lokal menjadi kunci utama dalam keberhasilan menyelesaikan konflik tanah yang sangat sensitif (Muryanti, dkk. 2013: 105).

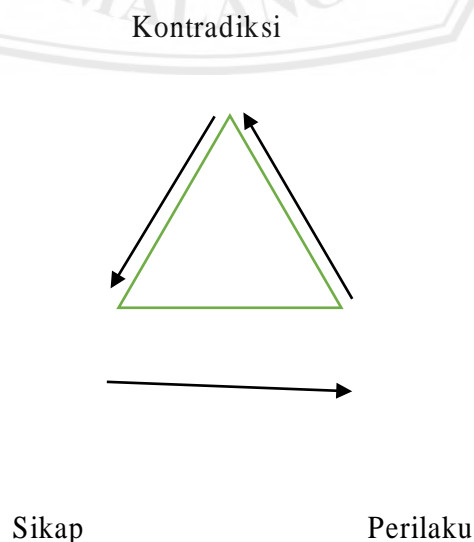
Resolusi konflik mensyaratkan kita untuk memahami dan menganalisis konflik itu sendiri (*conflict analysis*) agar memiliki pemahaman yang jelas mengenai segala sisi dari konflik dan mampu mendiagnosis penyebab utama atau sumber konflik Papua (Pekey, 2018: 244). Salah satu pendekatan dalam penyelesaian konflik politik dan konflik sosial tersebut adalah pendekatan resolusi konflik, karena resolusi konflik menekankan pada penyelesaian konflik yang sudah kompleks sumbernya dan kompleks dimensinya, sebagaimana yang terjadi di Papua (Pekey, 2018: 252). Sumber konflik sebagai sebab musabab munculnya konflik pada suatu komunitas atau masyarakat dan wilayah. Sumber konflik sebagai pemicu terjadinya konflik dengan berbagai motif, bisa karena motif politik, ekonomi, sosial, atau lingkungan. Untuk mengatasi konflik, setidaknya perlu mengetahui dengan saksama sumber-sumber konflik, dampak konfliknya, sehingga bisa menemukan jalan keluar sebagai resolusi penyelesaian konflik (Pekey, 2018: 254).

C. Landasan Teori

Dalam penelitian ini, untuk sementara dipilih satu teori yang dapat memahami dan menganalisis sesuai dengan fenomena sosial yang kerap terjadi di Kabupaten Mimika, dalam hal ini perang antar suku. Teori tersebut adalah Segitiga Konflik Johan Galtung.

Dalam buku Susan (2009), mengatakan bahwa Analisis konflik multidisipliner diperlihatkan oleh Galtung dalam penjelasannya mengenai intervensi konflik. Menurut Galtung intervensi harus dilakukan secara netral. Posisi ini merupakan ciri dari mazhab positivis. Namun demikian, Galtung pun menyarankan perubahan-perubahan tertentu dilakukan untuk menciptakan hubungan konflik yang konstruktif. Pendekatan ini yang kemudian disebut sebagai *transcend approach* (Rombostham, Wood, dan Miall, 2003: 10, Galtung, 2017).

Salah satu sumbangan sosiologi konflik Galtung memperlihatkan berbagai individu, kelompok dan organisasi membawa angka kepen-tingannya masing-masing. Kepentingan bisa berwujud dalam bentuk ekonomis maupun politis. Dua kelompok sosial dengan kepentingan ekonomis dalam satu lingkungan yang sama, misalnya dua kelompok pedagang di pasar, masing-masing akan menciptakan persepsi terhadap kepen-tingan kelompok di luarnya. Proses ini akan membawa pada bentuk perilaku-perilaku tertentu yang menciptakan kontradiksi dan situasi ketegangan. Lihat pada bagan di bawah ini:



Gambar: 1. Segitiga konflik Galtung

Segitiga konflik ini merupakan analisis hubungan sebab akibat atau interaksi yang memungkinkan terciptanya konflik sosial. Ada tiga dimensi dalam segitiga konflik Galtung, yaitu sikap, perilaku dan kontradiksi. Sikap adalah persepsi anggota etnis tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain. Perilaku dapat berupa kerjasama, persaingan atau paksaan, suatu gerak tangan dan tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan.

Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan problem dan perilaku sebagai suatu proses, artinya kontradiksi diciptakan oleh unsur persepsi dan gerak etnis-etnis yang hidup dalam lingkungan sosial. Secara sederhana, sikap melahirkan perilaku, dan pada gilirannya melahirkan kontradiksi atau situasi. Sebaliknya, situasi bisa melahirkan sikap dan perilaku (Rombostham, Wood, dan Miall, 2003; 10). Misalnya persepsi etnis A terhadap etnis B adalah negatif, maka muncul perilaku etnis A yang tidak kooperatif terhadap etnis B, sehingga menimbulkan situasi yang kurang baik atau kontradiksi. Sebaliknya sikap etnis A akan dibalas dengan sikap dan perilaku etnis B dalam konteks antagonistik (melawan) (Susan, 2009 : 82-84).

Galtung menawarkan model segitiga. Ia mengatakan bahwa konflik dapat sebagai sebuah segitiga, yakni kontradiksi, sikap dan perilaku (Miall, dkk, 2000 dalam Liliweri, 2005 : 314-315). *Pertama*, kontradiksi yang merujuk pada dasar situasi konflik, termasuk ketidakcocokan tujuan yang ada atau dirasakan oleh pihak-pihak yang bertikai, yang disebabkan oleh apa yang disebut ketidakcocokan antara nilai sosial dan struktur sosial. Dalam konflik asimetris, kontra-diksi ditentukan oleh pihak-pihak yang bertikai, hubungan mereka, dan benturan kepentingan inheren di dalam mereka.

Kontradiksi jika dikaitkan dengan perang antar suku di Mimika, tentu antara suku yang satu dengan suku yang lain, individu dengan individu yang lain, kelompok dengan kelompok

yang lain; sangat berbeda, ketidaksesuaian, ketidaksamaaan, memiliki perbedaan tujuan bahkan ketidakpahaman di dalam kehidupan mereka. Terutama dalam hal sikap, perilaku, persepsi, pemahaman tentang sesuatu dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi suatu sumber konflik dan terjadi konflik. Salah satu contoh perang antar suku di Mimika antara marga Ongomang dengan marga Komangal yang terjadi pada bulan Mei tahun 2012 yang lalu merupakan ketidaksesuaian atau ketidakcocokan tentang persepsi, pemahaman dan kesalingtidakpercayaan bahkan perbedaan tujuan, sehingga terjadilah perang antara marga Ongomang dengan Komangal di Mimika.

Berkaitan dengan perang antar marga tersebut, keluarga korban bersama pihak kepolisian dari polisi lalulintas (polantas) melakukan penyelidikan kasus kematian Ronny. Kepolisian dari polantas mengatakan murni kecelakaan, tetapi keluarga korban tidak terima karena tidak ada tanda-tanda lecet atau sobek bagian tubuh korban. Pada tanggal 29 Mei 2012, keluarga korban menuduh dan mengundang semua tokoh dan orang tua Aroki Komangal untuk pergi langsung menghadap pihak kepolisian bagian polantas dan minta keterangan se jelas-jelasnya. Maka dari pihak polantas mengatakan kecelakaan murni tidak ada pelaku, namun pihak keluarga korban tidak puas dengan keterangan polisi. Akibat ketidakpuasan itu, pihak keluarga korban menuduh Aroki Komangal sebagai pembunuh tanpa bukti yang jelas. Meskipun Atimus Komangal dan Benyamin Kiwak kepala suku besar Damal meminta maaf kepada keluarga korban, namun keluarga korban menolak kata maaf dari pihak yang dituduh, dan keluarga korban menyatakan mau cari bukti di lapangan dengan adu fisik atau terjadilah perang suku. Melihat kasus tersebut, diketahui bersama bahwa ketidakcocokan atau ketidaksesuaian dalam hal pemahaman, perilaku, sikap, persepsi dan lain sebagainya, sehingga terjadilah perang antara marga Komangal dengan marga Ongomang di Distrik Kwamki Lama, Kabupaten Mimika.

Terkait dengan itu, pihak Ongomang (korban) mempertahankan pendirian bahwa pihak Komangal dituduh dan ditetapkan sebagai satu-satunya pelaku pembunuhan, meskipun polisi dan dokter mengatakan bahwa itu kecelakaan murni. Tetapi pihak Korban tetap saja bersikeras dan mempertahankan pendirian dengan mengatakan kita buktikan dilapangan, sehingga terjadilah perang antara Ongomang dengan Komangal. Mempertahankan pendirian yang dapat dilihat dari perspektif pemikiran Englander disebut agresi instrumental.

Kedua, sikap yang dimaksud termasuk persepsi pihak-pihak yang bertikai dan kesalahan persepsi antara mereka dan dalam diri mereka sendiri. Sikap ini bisa positif, bisa negatif. Tetapi dalam konflik dengan kekerasan, pihak-pihak yang bertikai cenderung mengembangkan stereotif yang merendahkan satu sama lain. Sikap ini sering kali dipengaruhi oleh emosi seperti takut, marah, kepahitan, dan kebencian. Sikap tersebut termasuk elemen emotif (perasaan), kognitif (keyakinan) dan konatif (kehendak). Para analis yang menekankan aspek subjektif ini dikatakan mempunyai pandangan ekspresif terhadap sumber-sumber konflik.

Dalam hal sikap terutama bersifat emotif (perasaan), hal ini dijaga ketat oleh masyarakat yang berperang atau dalam kehidupan mereka secara turun-temurun. Perang antar suku A dengan suku B, misalnya ada dua bersaudara kakak beradik. Dalam perang tersebut kakaknya bergabung dengan suku A dan adiknya bergabung dengan suku B, kemudian saling berperang, suatu ketika adik yang bergabung di suku B terkena anak panah dari suku A sebagai suku lawan atau musuh kemudian meninggal, dengan melihat kondisi seperti itu kakaknya mengambil keputusan untuk pindah ke suku B dengan alasan untuk membalas adiknya yang meninggal dalam perang tadi. . Oleh karena itu, dalam perang antar suku baik tindakan maupun perkataan menyangkut dengan perang antar suku harus berhati-hati. Bicara harus netral dan jujur tidak boleh berpihak apalagi ucapan-ucapan yang sifatnya mengkhianati atau ujaran kebencian. Ucapan mengkhianati dalam bahasa Amungme disebut dengan *mejim*. Sebab

itu dalam perang, sikap *mejim* dilarang karena *mejim* merupakan merusak tatanan kehidupan mereka secara turun-temurun. Menurut kepercayaan atau pemahaman atau kebiasaan dalam perang suku bahwa sikap seperti itu tidak boleh terjadi, karena itu harus memiliki sikap yang berintegritas dan solid.

Aspek subjektif terjadi karena memiliki pengalaman yang sama dengan emosi yang berbeda, sebagai contoh perang antar suku Dani dengan suku Moni, perang berlangsung pada tahun 2014. Suku Moni merupakan pemilik tanah di Djayanti, Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika. Tetapi suku Dani bersikeras bahwa tanah yang sama merupakan pemiliknya dengan alasan, waktu pertama datang ke Djayanti belum ada orang yang tinggal di tempat tersebut dan mereka (suku Dani) yang menempati lebih dahulu, tetapi pemilik tanah bukan mereka. Namun, mereka mengaku bahwa di sini tanah kosong tidak ada pemiliknya, sehingga kami tebang pohon kemudian bangun rumah dan tempati di sini. Sedangkan suku Moni mengatakan bahwasannya meskipun hutan lebar tidak ada orang yang menempati, tetapi ada pemiliknya jika siapapun yang mau menempati harus izin dulu kepada kami sebagai pemilik tanah ini. Dengan demikian, mereka memiliki sikap dan pandangan yang berbeda inilah yang kemudian terjadi perang antara suku Dani dengan suku Moni.

Ketiga, perilaku termasuk kerja sama, persaingan atau pemaksaan, gerak tangan atau tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan. Perilaku konflik dengan kekerasan dicirikan oleh ancaman, pemaksaan, dan serangan yang merusak. Para analis yang menekankan aspek objektif seperti hubungan struktural, kepentingan material atau perilaku yang bertentangan, dikatakan mempunyai sumber konflik.

Berkaitan dengan perilaku konflik, maka perang antar suku di Mimika merupakan suatu persaingan ketat antara suku, dimana suku yang satu ingin mendominasi suku yang lain terutama dalam hal kekuatan suku. Dalam peperangan itu mereka menunjukkan kekuatan

masing-masing dan tidak ingin kalah di dalam perang tetapi harus menang dan kuat, sehingga suku-suku yang lain takut kepada mereka (suku yang kuat dan menang dalam perang). Dengan melihat fenomena dilapangan bahwa di antara suku yang satu dengan suku yang lain tidak pernah mengalah, namun justru saling mempertahankan apa yang menjadi argumen mereka dengan mengatakan bahwa kami juga laki-laki sama dengan anda, kami mempunyai peralatan perang yang sama. Jadi kami tidak takut untuk melawan atau antagonistik, kecuali maju dengan senjata barulah kami takut.

Dengan mengetahui ungkapan seperti ini bahwa secara otomatis terjadi persaingan atau pemaksaan dengan melakukan upaya-upaya tertentu untuk mempertahankan dan mengalahkan suku lain, sehingga kemudian ingin mendominasi terhadap suku-suku lain pula. Selain itu, dalam perang harus menjadi pemberani, berani mengambil keputusan, melatih keberanian, pemimpin yang kuat dan disegani, belajar strategi dalam membuat berbagai hal dan lain sebagainya.

Perang antar suku di Kabupaten Mimika merupakan mempunyai suatu makna yang lebih dalam dan memiliki nilai-nilai historis yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka, sehingga perang itu terus-menerus dipelihara dan dijaga secara turun-temurun hingga saat ini. Perang itu bagian terpenting di dalam kehidupan mereka, menyangkut perang itu orang tua-tua biasanya mengajak anak-anak muda untuk ikut dalam perang, sehingga anak-anak muda dapat memahami makna perang antar suku yang terkandung di dalamnya. Makna-makna tersebut, di antaranya adalah (1) menjadi suku yang dominan dan kuat di antara suku-suku yang lain; (2) melatih keberanian di dalam perang untuk menjadi pemberani; (3) melatih kepemimpinan; (4) latihan strategi perang; (5) menjadi popularitas dikalangan suku-sukunya; (6) pertumbuhan secara fisik lebih cepat, khususnya anak-anak remaja; dan lain sebagainya.

Tradisi suku-suku yang ada disekitar Mimika masih dipegang teguh untuk memelihara eksistensi sekaligus upaya untuk menjadi suku yang dominan di antara suku-suku lain. Kolektivitas di dalam suku dijaga ketat dengan tradisi, sehingga kesadaran kolektif tetap tertanam. Suku yang ingin menjadi suku yang dominan dan kuat terhadap suku-suku lain, dengan tujuan supaya suku-suku tersebut takut kepada mereka, karena mereka sudah memiliki kekuatan-kekuatan khusus dan suku-suku lain tidak mempunyai kekuatan tersebut. Suku-suku yang kuat merupakan sudah menjadi pilihan sejak lahir atau secara turun-temurun sudah ada. Jumlahnya banyak atau sedikit tidak menjadi ukuran yang penting memiliki kekuatan sehingga ditakuti dan ingin dihormati oleh suku-suku lain, sehingga biasanya suku-suku yang kuat mendominasi suku-suku yang lemah atau suku-suku yang kalah dalam pertempuran perang.

Berkaitan dengan teori paradigma kritis ini bahwa PT Freeport Indonesia, TNI-POLRI dan Pemerintah sangat mendominasi, memarginalisasi maupun penindasan terhadap masyarakat. PT Freeport Indonesia, TNI-POLRI dan pemerintah mendominasi masyarakat tentu saja didor-ong oleh kekuatan-kekuatan tertentu, kekuatan tersebut adalah kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Fakta-fakta ini dapat terlihat dari setiap perang suku yang terjadi di Kabupaten Mimika benar-benar dimanfaatkan secara baik oleh ketiga pemangku kepentingan tersebut untuk kepenting-annya masing-masing. Dalam dua kekuatan tersebut yang paling dominan dan paling kelihatan ialah kekuatan politik.

Pada tahun 2007 telah terjadi perang antar suku di areal PT Freeport Indonesia, Distrik Tembagapura antara gabungan dari suku Dani dan Damal dengan suku Amungme. Jika diikuti proses yang sudah ada bahwa sebetulnya perang itu antara gabungan dari suku Dani dan suku Damal dengan pihak Freeport, bukan dengan suku Amungme, karena melihat kronologis yang sudah terjadi bahwa salah satu pemuda dari pihak suku Dani dan Damal dalam keadaan minum-minuman keras kemudian masuk di Lupa Lela. Lupa Lela merupakan tempat *reffressing* khusus untuk karyawan Freeport. Namun, pemuda (bukan karyawan) tersebut terobos masuk melalui

jendela, tidak masuk melalui pintu karena di pintu masuk dijaga ketat oleh satpam. Satpam berhasil usir keluar dari ruangan Lupa Lela kemudian mengejar. Akhirnya pemuda itu lari keluar dan menjatuhkan diri dari tembok yang tinggi, tidak jauh dari Lupa Lela lalu kemudian tewas. Dia tidak ingat kalau di situ ada tembok yang tinggi, karena minuman beralkohol yang sudah menguasai dirinya.

Dengan melihat kondisi seperti itu, maka suku Dani dan suku Damal menuduh dan menetapkan suku Amungme sebagai pelaku pembunuhnya, karena dugaan kuat dan alasan bahwa salah satu satpam suku Amungme yang ada di Lupa Lela waktu kejadian, tapi tidak serius menangani. Terkait dengan itu, maka ada dua hal penting yang membuat kecurigaan suku Dani dan Damal terhadap suku Amungme, yakni: *pertama*, kenapa satpam suku Amungme yang bertugas di Lupa Lela waktu itu, tidak mengatasi atau mengamankan? *kedua*, suku Dani dan suku Damal menuduh bahwa suku Amungme lebih dekat dengan Freeport, karena itu baiknya kami perang dengan suku Amungme, kalau perang dengan pihak Freeport sangat sulit, karena Freeport memiliki kekuatan besar yakni TNI/Polri yang mengelilingi atau memagari Freeport.

Pada masa operasipun, peran pemerintah pusat tetap dominan, dalam usaha menjaga dan melindungi PTFI dari serangan penduduk asli. Penjagaan tentara ada di sekitar Mimika, tepatnya di dalam kota Kuala Kencana, dipintu masuk kawasan Tembaga-pura dan sekitar kota Tembaga-pura yang berbatasan dengan penduduk. Di dalam setiap bentrokan dengan penduduk asli, pemerintah, melalui tentaranya selalu mengalahkan rakyat dan berpihak kepada PTFI, untuk mengamankan kebijakan-kebijakannya dan melindungi Freeport.

Hal ini dinilai oleh Kepala Suku Besar Amungme Tom Beanal sebagai penyebab meros-otnya wibawa pemerintah. Dikatakan bahwa:

Dalam mata masyarakat, wibawa pemerintah maupun ABRI sudah jatuh sekali, a.l. karena orang dibiarkan membunuh orang di depan matanya tanpa bereaksi sedikitpun, dan tanpa mencari keadilan. Pokoknya dunia menjadi semakin gila (Beanal dalam Kafiari, 2000 : 26).

Hal senada juga di sampaikan oleh Pastor dari Gereja Tiga Raja, di kota Mimika, yang menyatakan bahwa:

Konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan Freeport telah merosotkan wibawa pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dapat dilihat secara nyata setelah kasus kerusuhan (Maret 1996), di mana para perusuh bukannya dihukum, tetapi dibawa ke Jakarta, diajak bertemu para petinggi Negara dan pulang menganggap diri pahlawan.

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa penyebab konflik antara pemerintah dengan masyarakat adalah karena kebijakan-kebijakannya telah meninggalkan atau menganggap musuh masyarakat lokal dan tidak menegakkan keadilan. Pada waktu mereka protes akibat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan masyarakat, dihadapi dengan cara represif, menggu-nakan kekuatan tentara. Di samping itu, ada perlakuan istimewa terhadap aktor-aktor kesukuan, yang seharusnya ditindak tegas. Pembinaan terhadap kekerasan dan tindakan kekerasan oleh tentara pada akhirnya menjadi sumber protes baru, dan dikemudian hari dijadikan alasan untuk menggugat pemerintah/ABRI atas pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap masyarakat lokal (Ngadisah, 2003 : 252-253).

Kasus-kasus konflik kekerasan horizontal dalam masyarakat yang bersifat kolektif, yaitu dengan adanya pelibatan jumlah masa yang besar, dua cara agresi yakni agresi instrumental dan agresi benci atau emosi untuk cenderung mengalami pembauran secara kompleks. Seperti pada kasus di desa Pelauw, ketika masing-masing kelompok merasa perlu menggunakan kekerasan untuk mempertahankan atau memenangkan pendirian, penggunaan kekerasan bisa berubah tujuan-nya untuk melukai atau memusnakan lawan setelah ada anggota yang menjadi korban.

Pada kondisi inilah bara kekerasan menjadi tidak mudah dipadamkan walaupun telah menurunkan 200 personil. Apabila jika lembaga keamanan di Indonesia masih memiliki lemah kapasitasnya dalam sistem antisipasi konflik kekerasan sosial. Hal ini kemudian dipersepsi warga sebagai bentuk pembiaran adanya konflik kekerasan oleh lembaga kepolisian. Ketua Komnas HAM Maluku, Emmy Tahapary, menyatakan, ada faktor pembiaran karena baru menurunkan pengamanan (Susan, 2012 : 130-131).

Berdasarkan setiap konflik perang antar suku di Kabupaten Mimika, maka terkait dengan hal itu peneliti sudah mengumpulkan data terutama melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain bahwa konflik perang antar suku di Mimika tidak hanya satu permasalahan melainkan berbagai macam permasalahan, misalnya; masalah tanah, harta perempuan, dendaman, minuman keras (miras), pendulangan emas tradisional, posisi/jabatan, pemekaran wilayah, pemilihan kepala daerah (pilkada), dan lain sebagainya. Tetapi konflik antar suku ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam penelitian ini hampir semua orang informan mengatakan bahwa setiap konflik perang antar suku di daerah Mimika ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan orang-orang tertentu.

Dengan melihat kondisi seperti ini, pemerintah daerah dan TNI/Polri dengan sengaja memelihara dan pembiaran konflik perang antar suku di Kabupaten Mimika. Salah satu bentuk pembiaran dapat terlihat pada perang antar suku antara suku Dani dengan suku Moni di Jayanti, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, seorang informan yang menjelaskan bahwa ketika di lokasi perang oknum aparat keamanan memberi semangat kepada salah satu kubu supaya dengan semangat menyerang kepada kubu lawan bahwa “ayo Serang, kamu juga bisa”. Artinya, hal seperti ini merupakan salah bentuk pembiaran yang secara terorganisir dilakukan oleh oknum-oknum aparat keamanan yang bertugas di Kabupaten Mimika. Selain itu, TNI/Polri sangat senang jika ada konflik di daerah bertugas, karena anggaran dana untuk pengamanan

sudah cukup besar. Oleh karena itu, setiap konflik yang kerap terjadi di Kabupaten Mimika, dengan sengaja memelihara dan terjadi pembiaran oleh TNI/Polri dan pemerintah secara terstruktur dan terorganisasi.

